

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2021, sebagaimana tercatat dalam situs Open Data Jabar berkisar lebih dari 18,8 triliun, pendapatan ini terdiri dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah berupa pembangunan infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan daerah itu sendiri. Lima jenis pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor I dan II (BBNKB I & II), pajak air permukaan (PKP), pajak rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Dengan semakin besarnya sumber pendapatan daerah, untuk pencapaian ini diperlukan kesigapan aparat pajak dalam menerapkan *good governance*. Salah satu prinsip *good governance* ini yaitu transparansi agar kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik sesuai anggaran, sehingga negara bisa menerima pemasukan pajak dari masyarakat dengan maksimum untuk kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk kantor bersama SAMSAT untuk menerbitkan informasi publik atas aktivitas yang dilaksanakannya. Dalam konteks SAMSAT pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi. Dengan kata lain bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat undang-undang, sehingga SAMSAT atau pusat pengelolaan pendapatan daerah harus melaksanakan prinsip transparansi tersebut. Selain itu, ditetapkannya beberapa regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik tujuannya adalah untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pusat pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Transparansi adalah mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi adalah bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik (Hoa & Zamor, 2017). Transparansi akan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat (publik) sehingga apa yang (Sejarah Bapenda n.d.)dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya apa yang diinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui pemerintah.

Pelaporan keuangan merupakan elemen penting dalam sebuah instansi maupun perusahaan. Dimana publik bisa mengukur dan melihat keberhasilan serta kondisi instansi/perusahaan dari keuangannya. Informasi keuangan harus terbuka dan transparan sebagai upaya untuk mereduksi segala bentuk kecurangan pengelolaan keuangan dan pengendalian dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Dalam hal transparansi ini, terdapat kasus penggelapan pajak yang terjadi di SAMSAT Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang melibatkan 4 petugas pada bulan April 2022 ini. (Fikri, 2022). Beberapa penelitian terhadap data pengelolaan keuangan daerah pada *website* resmi pemda, memberikan kesimpulan bahwa tingkat keterbukaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan *Open Budget Index* masuk dalam kategori *Insufficient*/tidak cukup. (Alwahidi dan Darwanis, 2019), pun demikian pada pemerintah provinsi (Ritonga dan Syamsul, 2016).

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Cibadak merupakan kantor SAMSAT yang menyumbang lebih banyak pendapatan pajak dan sebagai jantung ekonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Cibadak dalam penyelenggaraan-

nya, walaupun komitmen dan ketentuan perundangan sudah ditetapkan untuk mengatur transparansi keuangan, masih banyak masalah dalam implementasi di lapangan. Masyarakat yang menilai kurang transparan terkait keuangan, apakah memang sistem transparansi yang belum dijalankan dengan baik karena kurangnya keterbukaan informasi tentang laporan keuangan SAMSAT. Apabila informasi tersebut belum sepenuhnya dapat sampai ke masyarakat maka masyarakat juga belum sepenuhnya mampu menjalankan sistem pengawasan publik pada keuangan SAMSAT. Bagaimanapun, sebuah instansi pemerintah seperti ini harus memiliki transparansi sebagai *good governance*, ini ditujukan agar ada peningkatan kepercayaan rakyat terhadap legitimasi pemerintahannya yang bertindak selaku pelaksana utama kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka di sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian laporan tugas akhir dengan judul: **“Analisis Tranparansi Pelaporan Keuangan Di Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah 1 Cibadak.”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian laporan tugas akhir, penulis membatasi masalah pada transparansi pelaporan keuangan, dan tempat penelitian di Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah 1 Cibadak.

C. Tujuan

Adapun kegiatan yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi pelaporan keuangan di Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah 1 Cibadak dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam transparansi pelaporan keuangan serta solusinya.

D. Manfaat

1) Bagi Mahasiswa

- Mahasiswa/i dapat mengetahui Transparansi Keuangan di Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah 1 Cibadak

- Memperluas wawasan dan memantapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/i serta memberikan secara langsung kepada mahasiswa/i penerapan ilmu di bidang manajemen.
 - Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh kedalam permasalahan perpajakan.
- 2) Bagi Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah 1 Cibadak
- Membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah, seperti POLRI, Badan Pendapatan Provinsi dan bagi PT. Jasa Raharja
 - Sebagai sarana dalam pengadaan pegawai atau sumber-sumber kemampuan dalam menciptakan ide baru untuk masa yang akan datang.
 - Sebagai salah satu bahan pertimbangan evaluasi.
- 3) Bagi STIM YKPN Yogyakarta
- Meningkatkan hubungan kerja sama antara STIM YKPN dengan Instansi Pemerintah khususnya Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah 1 Cibadak.
 - Memberikan uji nyata terhadap disiplin ilmu yang telah disampaikan melalui bangku perkuliahan khususnya dibidang perpajakan dan manajemen keuangan.